

**F PERAN LURAH DALAM PENGELOLAAN DANA KELURAHAN UNTUK  
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DI  
KELURAHAN SIMPANG BELUTU KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK  
PROVINSI RIAU**

Dody Kurniawan

NPP. 30.0235

*Asdaf Kabupaten Siak, Provinsi Riau*

*Prodi Politik Indonesia Terapan*

Email: 30.0235@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing: Arwanto Harimas Ginting, S.STP., M.Si.

**ABSTRACK**

**Problem Statement/Background (GAP):** The role of the village is to carry out duties and responsibilities in managing village funds. This is because the Lurah has a duty and role in assisting the sub-district, namely carrying out village government activities, empowering the community, maintaining infrastructure and public service facilities. The budget management of Simpang Belutu village funds comes from the APBD. Thus, the district government is obliged to allocate a budget in the regional budget for the construction of local village facilities and infrastructure through the sub-district budget. **Purpose:** The purpose of this research is to know the role of Lurah in managing village funds to improve the development of facilities and infrastructure in Simpang Belutu Village. **Method:** This thesis uses Biddle and Thomas' role theory which consists of expectations, norms, forms of behavior, judgment, and sanctions. This research uses a qualitative descriptive approach method with references to data and literature from the research results. Data collection techniques are carried out by interviews and documentation then using data analysis techniques, namely data reduction, data presentation, and conclusions. **Results:** The results of this study show that the community has carried out roles based on duties and responsibilities. transparency of village budget management for the construction of facilities and infrastructure. These developments include the procurement of stunting prevention equipment on toddlers, road infrastructure development, and the construction of halfway houses in the form of reading gardens. There are efforts made in managing village funds, namely by regenerating human resources through objective recruitment and selection so that it is carried out based on a series of tests that can measure their competencies and skills. Other efforts also optimize community participation to participate in village fund management. **Conclusion:** The role of the village in managing village funds to improve the development of facilities and infrastructure in Simpang Belutu Village, Kandis District, Siak Regency is seen from development. The development of facilities and infrastructure is proven by the role of the Simpang Belutu Subdistrict has carried out advance planning related to stunting prevention programs for toddlers, road infrastructure development, construction of halfway houses in the form of reading gardens with deliberation based on regulations. The deliberations were carried out by involving village officials, village community empowerment institutions, and the community.

**Keywords:** The role of the village, village fund management, infrastructure development.

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Peran lurah yaitu melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam pengelolaan dana kelurahan. Sebab, Lurah memiliki tugas dan peran dalam membantu camat yakni melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan, melakukan pemberdayaan masyarakat, memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum. Pengelolaan anggaran dana kelurahan Simpang Belutu berasal dari APBD. Sehingga, pemerintah kabupaten wajib mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan melalui anggaran kecamatan. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui peran Lurah dalam pengelolaan dana kelurahan untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Simpang Belutu. **Metode:** Skripsi ini menggunakan teori peran Biddle dan Thomas yang terdiri dari harapan, norma, wujud perilaku, penilaian dan sanksi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan referensi data dan literatur hasil penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi kemudian menggunakan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan lurah telah melaksanakan peran berdasarkan tugas dan tanggung jawab. transparansi pengelolaan anggaran kelurahan untuk pembangunan sarana dan prasarana. Pembangunan tersebut seperti pengadaan perlengkapan pencegahan dampak stunting pada balita, pembangunan infrastruktur jalan, dan pembangunan rumah singgah berupa taman baca. Ada upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dana kelurahan yaitu dengan regenerasi SDM melalui rekutmen dan seleksi yang objektif sehingga dilakukan berdasarkan serangkaian tes yang mampu mengukur kompetensi dan ketrampilan yang dimilikinya. Upaya lainnya juga melakukan optimalisasi partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan dana kelurahan. **Kesimpulan:** Peran lurah dalam pengelolaan dana kelurahan untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak ditinjau dari pembangunan. Pembangunan sarana dan prasarana dibuktikan peran lurah simpang belutu sudah melaksanakan perencanaan terlebih dahulu terkait dengan program pencegahan stunting pada balita, pembangunan infrastruktur jalan, pembangunan rumah singgah berupa taman baca dengan musyawarah yang dilandasi dengan regulasi. Musyawarah tersebut dilaksanakan dengan melibatkan perangkat kelurahan, lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan, dan masyarakat.

**Kata Kunci:** Peran lurah, pengelolaan dana kelurahan, pembangunan sarana prasarana.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyebutkan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu pemerintah daerah adalah unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah sebagai kewenangan daerah otonomi. Pada hakikatnya otonomi daerah diberikan kepada rakyat sebagai salah satu bentuk kesatuan dari masyarakat hukum. Maka oleh sebab itu masyarakat hukum ini mendapatkan kewenangan yaitu untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang menjadi amanat oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Amanat tersebut dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD terkait semua urusan pemerintah dibantu oleh perangkat daerah (Kuddy, 2018).

Kelurahan merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat tetapi tidak memiliki

hak untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri(Saputro, 2021). Kelurahan sebagai perangkat kecamatan yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan seperti pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum dalam satu wilayah kelurahan yang berada di wilayah kerja kelurahan. Keberadaan kelurahan secara yuridis formal diakui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang kelurahan. Berdasarkan peraturan ini kelurahan dianggap wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan. Dari pemahaman ini, kelurahan sebagai suatu organisasi pemerintah yang memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur sendiri warga dan kepentingannya dibawah pengawasan kecamatan. Kewenangan otonomi yang dimiliki oleh kelurahan merupakan otonomi murni. Sehingga otonomi ini harus dipergunakan seluas-luasnya untuk kepentingan masyarakat termasuk dalam mengatur dan mengelola dana kelurahan berdasarkan tugas dan fungsi kelurahan. Tugas dan fungsi pemerintah kelurahan yaitu melaksanakan sebagian tugas pokok penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di ruang lingkup kelurahan sendiri sesuai aturan dan batas-batas kewenangan yang telah dilimpahkan.

Dana kelurahan merupakan hak kelurahan untuk mengelola dan mengatur berbagai anggaran keuangan kelurahan yang berguna meningkatkan kualitas dalam kehidupan masyarakat(Fitriyah, 2020). Dana kelurahan dikelola sebagai wujud pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam menunjang tugas dan fungsi kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas di ruang lingkup kelurahan. Kebijakan ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sesuai dengan program otonomi daerah. Pengelolaan anggaran dana kelurahan yang terdapat dalam bentuk penguatan manajemen kelurahan. Sehingga masing-masing kelurahan diberi wewenang atau yang disebut dalam pengelolaan anggaran dana sendiri sebagai pelaksanaan dari konsep otonomi daerah.

Data pengadaan alokasi dana kelurahan yang bersumber APBD yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa dana kelurahan Simpang Belutu mengalami peningkatan. Namun, dalam pengelolaan menjadi tantangan tersendiri terkait dana alokasi tersebut. Dimana jumlah yang di jelaskan terhitung banyak, sehingga dana kelurahan harus dilaksanakan dan dipergunakan sesuai dengan peraturan yang menjadi dasar pelaksanaannya. Untuk itu, pengelolaan dana kelurahan diperlukan adanya peran lurah untuk mewujudkan transparansi dan efektivitas dalam pengelolaan dana kelurahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan tugas tersebut pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Alokasi anggaran tersebut dimasukkan ke dalam anggaran kecamatan pada bagian anggaran dana kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan pengamatan dengan mengambil judul **“PERAN LURAH DALAM PENGELOLAAN DANA KELURAHAN UNTUK MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DI KELURAHAN SIMPANG BELUTU”**.

## **1.2 Kesenjangan Masalah**

Pelaksanaan anggaran dana kelurahan merupakan dana yang berasal dari APBD. Pemerintah kabupaten atau kota wajib mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan. Dana kelurahan termasuk dalam anggaran Kecamatan. Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan di kelurahan dilakukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan, dinyatakan anggaran kelurahan di kawasan kota yang tidak memiliki

desa minimal 5 persen dari APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Bagi daerah yang memiliki desa, anggaran kelurahan harus diberikan minimal sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten atau kota tersebut. dana kelurahan bersifat tambahan, karena selama ini anggaran untuk kelurahan sudah ada melalui SKPD. Adapun anggaran dana kelurahan masuk kedalam anggaran kecamatan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sehingga, dana kelurahan untuk kelurahan simpang belutu sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Anggaran Dana Kelurahan**  
**Berdasarkan DPA Kecamatan Kandis 2021-2022**

No	DPA Kecamatan Kandis		Tahun
	Anggaran Dana Kelurahan Simpang Belutu	Total anggaran Kecamatan kandis	
1.	Rp 372.464.269	Rp 7.449.285.376	2021
2.	Rp 386.577.972	Rp 7.731.559.446	2022

Sumber: DPA Kecamatan Kandis

Data pengadaan alokasi dana kelurahan yang bersumber APBD yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa dana kelurahan Simpang Belutu mengalami peningkatan. Namun, dalam pengelolaan menjadi tantangan tersendiri terkait dana alokasi tersebut. Dimana jumlah yang di jelaskan terhitung banyak, sehingga dana kelurahan harus dilaksanakan dan dipergunakan sesuai dengan peraturan yang menjadi dasar pelaksanaannya. Untuk itu, pengelolaan dana kelurahan diperlukan adanya peran lurah untuk mewujudkan transparansi dan efektivitas dalam pengelolaan dana kelurahan.

### 1.3 Penelitian Terdahulu

Pertama, Komang Ayu Kusuma Wardani, Ni Nyoman Dewi Pascarani, dan Ni Wayan Supriyanti Peran Kepemimpinan Lurah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus : Kelurahan Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar dengan hasil Kekuasaan yang berubah mempengaruhi pemberdayaan masyarakat yang terjadi, hal tersebut terlihat dari dinamika ada tidaknya pergerakan seorang Lurah dalam menciptakan program pemberdayaan masyarakat, sehingga dengan adanya pondasi atau kesempatan yang diberikan oleh Lurah, masyarakat akan mau berpartisipasi di setiap kegiatan pemberdayaan tersebut. Pemberdayaan yang dilaksanakan di Kelurahan Samplangan ialah pemberdayaan melalui lembaga kemasyarakatan, yaitu LPM, PKK, dan Karang Taruna. Dalam lembaga ini, Lurah berperan sebagai pembina, fasilitator, dan mediator(Wardani et al., 2015).

Kedua, Aji Budiono Peran Kepemimpinan Lurah Dalam Pembangunan Daerah Melalui Lembaga Pemberdayaan untuk mewujudkan *good governance* Hasil Penelitian Peran Lurah Merjosari dalam pembangunan meliputi kegiatan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat melalui kegiatan dalam kewenangan formal maupun nonformal seperti shalat jumat, tahlilan, upacara, momen perkumpulan masyarakat. Pembangunan identitas masyarakat Merjosari menjadi dasar bagi rasa kepemilikan masyarakat Merjosari sehingga antusiasme partisipasi pemberdayaan masyarakat menjadi dominan serta didukung oleh kepemilikan pengelolaan aset secara mandiri oleh LPMK kelurahan Merjosari(Budiono, 2014).

Ketiga, Heru Arnanda Peran Lurah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kelurahan Maluhu Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai kartanegara Hasil Penelitian Peran Lurah meningkatkan sumber daya manusia di Kelurahan maluku sudah cukup baik, walaupun masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani mengharapkan Lurah bisa berperan lebih aktif lagi. Dan Peran Lurah dalam Perencanaan Pembangunan yang sudah sangat baik. Walaupun kurangnya komunikasi dan perhatian antara Kelurahan dan Kecamatan namun Peran

Lurah bisa mengajak masyarakat Maluku untuk bersama dalam merencanakan pembangunan di Kelurahan Maluhu(Arnanda, 2013).

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, Berdasarkan penelitian sebelumnya di atas bahwa persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang peran Lurah dimana penelitian ini menggunakan metode yang sama yaitu pendekatan kualitatif. Namun, memiliki perbedaan di lokasi dan pembahasan mengenai peran lurah di masing-masing daerah penelitian tersebut.

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran lurah dalam pengelolaan dana kelurahan untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Apa faktor pendukung dan penghambat peran lurah dalam pengelolaan dana kelurahan untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Apa upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan peran lurah dalam pengelolaan dana kelurahan untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan Pendekatan yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif studi kasus dalam menganalisis dan mendeskripsikan suatu fenomena atau objek penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dengan menekan pada suatu aspek atau pembahasan secara mendalam(Ibrahim, 2015). Penulis menggunakan teori Peran(Horoepoetri, 2003).

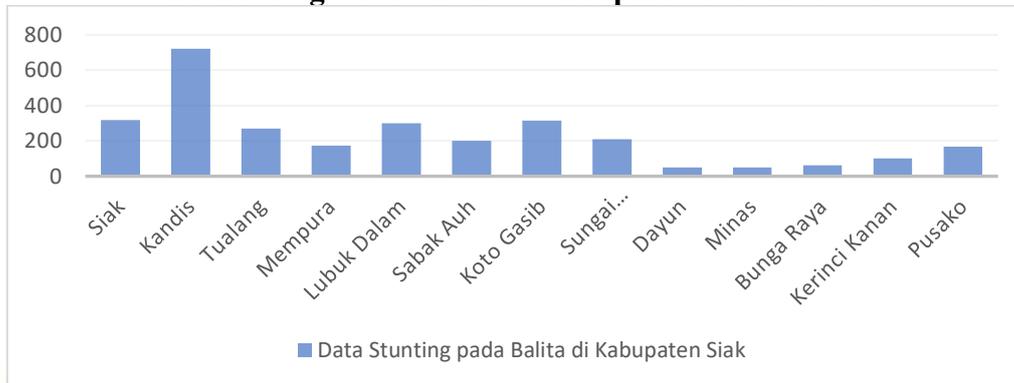
Informan pada penelitian ini terdapat 10 informan. Sumber data pada penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder(Sugiyono, 2012). Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi/gabungan(Sugiyono, 2017). Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis ada 2 yaitu Wawancara dan Dokumentasi(Sugiyono, 2012). Hasil dari data yang didapat kemudian dianalisis secara kualitatif melalui langkah-langkah berikut: Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan(Sugiyono, 2017).

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Peran Lurah Dalam Pengelolaan Dana Kelurahan Untuk Meningkatkan Pembangunan Sarana Dan Prasarana di Kelurahan Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak

##### 1. Harapan

**Gambar 3.1**  
**Data Stunting Pada Balita di Kabupaten Siak tahun 2021**



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, 2021

Data diatas menjelaskan bahwa kecamatan kandis merupakan kecamatan yang terbanyak mengalami stunting pada balita di kabupaten Siak. Hal ini yang menjadi faktor utama peran Lurah untuk menekan tingkat dampak stunting pada balita dikarenakan Lurah berada langsung di masyarakat untuk membantu tugas dari camat. Pencegahan stunting pada balita adalah suatu program pelayanan kesehatan yang dilaksanakan guna mencegah dampak stunting pada balita berdasarkan standar kesehatan dan ketentuan yang berlaku. Menurut informasi yang diperoleh dari camat Kandis, wilayah Kelurahan Simpang belutu masih memerlukan fasilitas penunjang untuk mencegah dampak stunting pada balita. Fasilitas tersebut diharapkan mampu diterima dan disepakati pemerintah daerah untuk dilaksanakan oleh lurah beserta perangkat kelurahan sebab wilayah Kelurahan masih memerlukan fasilitas tambahan untuk kegiatan pencegahan stunting pada balita.

**Tabel 4.5**

#### **Rincian Peralatan dan Perlengkapan untuk Menunjang Pencegahan Dampak Stunting pada Balita 2022**

NO	Jenis Peralatan	Harga	Unit	Jumlah
	<b>I. Kit Posyandu</b>			
1.	Timbangan Bayi	Rp 380.000,00	2 unit	Rp 760.000,00
2.	Timbangan Dacin dan Perlengkapannya	Rp 420.000,00	1 unit	Rp 420.000,00
3.	Timbangan Dewasa	Rp 170.000,00	2 unit	Rp 340.000,00
4.	Termometer	Rp 45.000,00	3 unit	Rp 135.000,00
5.	Alat pengukur tinggi badan	Rp 30.000,00	2 unit	Rp 60.000,00
6.	Peralatan Medis	Rp 350.000,00	2 paket	Rp 700.000,00
	<b>II. Bahan Habis Pakai</b>			
1.	Alkohol 1000 ml	Rp 70.000,00	3 botol	Rp 210.000,00
2.	Cairan desinfektan/Povidone 1000 ml	Rp 40.000,00	3 botol	Rp 120.000,00
3.	Kasa steril 3 x 10	Rp 80.000,00	4 kotak	Rp 320.000,00
4.	Kapas	Rp 60.000,00	4 kotak	Rp 240.000,00
5.	Suntik	Rp 50.000,00	5 kotak	Rp 225.000,00
7.	Sarung Tangan	Rp 45.000,00	3 kotak	Rp 135.000,00
8.	Masker	Rp 60.000,00	4 kotak	Rp 240.000,00

9.	Obat obatan medis	Rp 350.000,00	3 paket	Rp 1.050.000,00
	III. Perlengkapan			
1.	Tas Perlengkapan	Rp 130.000,00	2 unit	Rp 260.000,00
2.	Kotak Medis	Rp 160.000,00	1 unit	Rp 160.000,00
<b>Total</b>				<b>Rp 5.375.000,00</b>

Sumber: Laporan Musrenbang Kelurahan Simpang Belutu.

Dari data diatas merupakan laporan peralatan dan perlengkapan untuk menunjang pencegahan dampak stunting pada balita. Hal ini sejalan dengan indikator dari dimensi harapan yang diangkat oleh penulis bahwa pengadaan peralatan dan perlengkapan kesehatan yang dilaksanakan dalam kegiatan pencegahan dampak stunting pada balita sudah direncanakan oleh pihak kelurahan dengan melibatkan perangkat kelurahan, tenaga medis dan masyarakat.

Lurah Simpang belutu sudah memiliki perencanaan terlebih dahulu terkait dengan program Pencegahan stunting pada balitadiri dengan musyawarah yang dilandasi dengan regulasi dan dimensi harapan tadi. Adapun regulasi yang menjadi pondasi Lurah dalam merencanakan dan menjalankan program tersebut adalah berdasarkan dengan PP nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan bagian 2 pasal 30 mengenai pendanaan kelurahan tepatnya ayat ke tiga yaitu untuk merealisasikan pemberdayaan masyarakat maka dilaksanakan anggaran Kelurahan oleh lurah selaku pemegang kekuasaan pengguna anggaran.

## 2. Norma

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada Sekretaris Lurah Simpang Belutu, yaitu ibu Siti Nurkumalasari, AS,SE memaparkan unsur norma dari kepemimpinan lurah dalam berupaya mewujudkan pembangunan lewat pendekatan pada masyarakat.

“Dalam segala hal,lurah selalu melakukan pendekatan kepada masyarakat, ketelitian, keseriusan, dan ketegasan dalam mengambil kebijakan agar setiap kebijakan pembangunan kelurahan yang diambil terencana dan tepat sasaran. Dalam melakukan segala usaha guna tercapainya tujuan tersebut lurah biasanya membuat atau membangun dukungan masyarakat dengan melibatkan berbagai pihak yang relevan dengan kebijakan, melakukan lobi, negosiasi, dan koalisi dengan berbagai kelompok-kelompok masyarakat dan mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan”

Kemudian, berdasarkan salah satu hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap warga kelurahan Simpang Belutu, yaitu ibu Mawarni yang berprofesi sebagai pedagang sayur yang tentu salah satu penggunaan akses jalan raya di sekitar Simpang belutu bahwa beberapa akses jalan sudah mulai baik dan dilakukan perbaikan namun beliau masih merasakan bahwa perbaikan jalan ataupun pengaspalan jalan tidak terlalu awet untuk jangka panjang sebab pada curah hujan yang tinggi masih ada beberapa bagian jalan yang kembali berlubang.

Ibu Mawarni mengatakan bahwa :

"Setiap hari saya dari subuh ke sore bolak-balik jalanan naik sepeda motor namun masih terasa jalan yang sedikit menggerutu dan lubang yang bermunculan lagi. Saya berpikir bahwa aspal yang digunakan kualitasnya yang tidak premium sehingga yang tadinya bagus tapi tidak awet. Tetapi dibandingkan dengan kondisi jalan sebelumnya, kondisi jalan yang saat ini jauh lebih baik dan cukup aman untuk berkendara"

Berdasarkan informasi yang diperoleh kepada informan bahwa pembangunan terkait sarana dan prasarana jalanan selaku fasilitas publik terealisasi dengan nyata dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat sehingga mampu menciptakan norma kesusilaan yang baik di mata masyarakat terhadap kepemimpinan Lurah Simpang belutu. Selanjutnya terkait pengelolaan dana atas pembangunan infrastruktur tersebut tentunya menggambarkan norma hukum dan norma kesusilaan. Hal ini tentu digambarkan dari seberapa transparan lurah dalam

memaparkan besaran anggaran yang digunakan terkait pembangunan sarana dan prasarana tersebut di forum musyawarah.

Sekretaris Lurah Simpang Belutu mengatakan bahwa :

"Sistem transparansi dari Lurah Simpang Belutu ini adalah ketika sedang bermusyawarah terkait pengeluaran anggaran untuk perbaikan jalan adalah ketika rapat Kami menggunakan media proyektor di mana ditayangkan berupa slide show yaitu laporan keuangan dalam bentuk Excel terkait pemasukan dari APBD dan pengeluaran untuk perbaikan jalan. Tentunya berkoordinasi dengan dinas pekerjaan umum melalui camat".

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa transparansi dari pengeluaran dan pengelolaan anggaran Kelurahan dilakukan dan berjalan dengan baik selama musyawarah berlangsung. Selain itu, hal ini juga sejalan dengan landasan legalistik yaitu pada pasal 3 Permendagri 130 tahun 2018 tentang pembangunan ekonomi dan sarana untuk memberi dampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat agar meningkat dari sisi kemudahan bertransportasi dan akses jalan.

### **3. Wujud Perilaku**

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Lurah Simpang Belutu, adapun pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pada akhir tahun 2022 kemarin adalah tentang kegiatan sosialisasi mengenai pencegahan Stunting pada balita. Sosialisasi ini dipimpin langsung oleh Lurah Simpang belutu dan didampingi oleh pihak Puskesmas serta Dinas Kesehatan setempat. Sosialisasi ini dilakukan untuk memberdayakan para Masyarakat khususnya para wanita dan para ibu untuk memberikan penyuluhan terkait pentingnya menjalankan imunisasi kepada ibu yang sedang mengandung dan balita agar memperoleh nutrisi yang baik berupa imunisasi agar kesehatan para ibu dan balita dapat terjaga. Secara demografis juga kegiatan ini bertujuan untuk menekan angka stunting yang semakin bertambah setiap tahunnya. Selain itu, sosialisasi stunting diadakan sebab dilatar belakangi oleh beberapa ibu tidak memiliki akses terhadap makanan sehat dan bergizi seperti makanan berprotein tinggi, sehingga menyebabkan buah hatinya turut kekurangan nutrisi. Selain itu, rendahnya asupan vitamin dan mineral yang dikonsumsi ibu juga bisa ikut memengaruhi kondisi malnutrisi janin.

Lurah Simpang Belutu mengatakan bahwa :

"Walaupun informasi seputar pencegahan stunting pada balita sudah banyak dikenal masyarakat tetapi untuk menjalankannya masih minim inisiatif masyarakat. Sehingga di sini dari pihak kelurahan melakukan sosialisasi secara berkala tentang stunting serta pemberian imunisasi dan bantuan bahan pokok pangan para Masyarakat khususnya masyarakat yang sedang hamil maupun memiliki balita, para pasangan baru serta ibu yang baru melahirkan. Tentunya di sini dialokasikan dana dari Kelurahan terkait pembelian imunisasi dan pengadaan barang pokok sejumlah dari masyarakat yang menjadi partisipan sosialisasi. Dilanjutkan dengan konsumsi dan beberapa pihak yang akan diberi honor. Di samping itu ada juga penyuluhan tentang kesehatan ibu dan balita serta edukasi tentang kesejahteraan keluarga"

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa pengelolaan anggaran terhadap pemberdayaan masyarakat tampak pada pembelian alat kontrasepsi dan beberapa properti terkait untuk pelaksanaan sosialisasi tersebut kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan pasal 3 Permendagri 130 Tahun 2018 pada aktivitas pembangunan sarana prasarana khususnya terkait aktivitas pemberdayaan kesehatan masyarakat untuk memaksimalkan kapasitas diri masyarakat khususnya para wanita.

Kemudian terkait pembangunan sarana dan prasarana diperoleh informasi dari sekretaris Lurah Simpang belutu bahwa ada perencanaan dari Kelurahan untuk membangun rumah

singgah berupa taman membaca. Rumah singgah ini tujuannya untuk mengundang atau memberi edukasi terhadap anak-anak yang putus sekolah untuk belajar membaca dan menulis. Rumah singgah ini juga diperbolehkan untuk parah orang dewasa yang sekiranya ingin belajar membaca dan menulis lagi. Hal ini tujuannya untuk meningkatkan kompetensi masyarakat walaupun dominan pekerjaan dari masyarakat Simpang belutu adalah pekerja kasar atau pekerja terampil tetapi harus berkompeten dan tidak jauh tertinggal.

Sekretaris Lurah Simpang Belutu mengatakan bahwa :

"Sewaktu rapat bulan Januari Kemarin, kami menerima laporan bahwa masih banyak anak-anak yang putus sekolah dan tidak melanjutkan sekolah lagi gara-gara pandemi covid 19 kemarin. Sehingga pada usulan dari beberapa kasi dan pegawai untuk mendirikan rumah singgah untuk membaca dengan pengajar dari mahasiswa yang sedang melakukan magang. Ada juga mahasiswa yang sedang melakukan KKN juga kami minta untuk turut serta membantu dalam kegiatan pemberian edukasi terkait belajar membaca dan menulis tersebut. Sehingga Mata Pelajaran yang dipelajari di rumah singgah tersebut adalah calistung yaitu membaca, menulis dan berhitung. Harapan kami di sini adalah walaupun masih ada anak yang putus sekolah tetapi paling tidak mereka bisa membaca, menulis serta berhitung karena walaupun ada tersedia sekolah negeri yang gratis tetapi orang tua wajib menyediakan dana terkait apa yang dibutuhkan untuk anak sekolah."

Dari informasi yang diperoleh dari sekretaris Lurah Simpang belutu dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan rumah singgah tersebut merupakan pembangunan sarana dan prasarana berupa fasilitas publik yang artinya siapa saja boleh datang untuk belajar baik untuk diri sendiri ataupun keluarganya. Hal ini tentu sejalan dengan landasan legalistik berupa pasal 27 PP nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan bagian 2 pasal 30 tentang pendanaan kelurahan yaitu pendampingan masyarakat.

#### **4. Evaluasi**

Adapun pertanggungjawaban dari Lurah kepada Camat adalah untuk membantu menjalankan tupoksi dan visi misi berupa aktivitas pemerintahan kelurahan seperti pemberdayaan dan pemeliharaan sarana prasarana serta fasilitas publik. Selain itu pada pasal 10 Permendagri 130 Tahun 2018 juga dikatakan bahwa Camat menyusun RKA atau rencana kerja dan anggaran yang nantinya akan dijalankan dan diemban oleh lurah yang berisikan tentang persentase dari alokasi APBD dan alokasi khusus terhadap pembangunan di kelurahan. Setidaknya tidak ada 5% dari anggaran kota yang tidak ada kelurahannya dialokasikan dari APBD sesudah dikurangi dana alokasi khusus. Adapun bentuk pertanyaan yang diajukan peneliti terhadap Camat selaku informan pertama dari penelitian ini adalah terkait Bagaimana bentuk pengawasan serta monitoring dari camat terhadap Kelurahan untuk mengetahui seberapa besar produktivitas dan efeknya terhadap pembangunan sarana dan prasarana.

Camat Kandis mengatakan bahwa :

"Kegiatan serta evaluasi yang dilakukan pada Tahun 2022 ini tujuannya untuk meninjau sejauh mana gerakan PKK sekaligus 10 program intinya. Sekaligus pada persiapan mau naik PKK Kelurahan Simpang belutu ini tujuannya agar meyakinkan bahwa segi administrasi dari segala macam bentuk realisasi kegiatan dan rencana kegiatan benar-benar dipersiapkan dan tersusun secara sistematis. Monev ini juga memiliki format dan instrumen khusus yang tentunya dibantu oleh para perangkat dari Kecamatan dan prosesnya ada beberapa tahap yaitu dimulai dari proses pengumpulan data atas realisasi program, pelaporan kegiatan, sampai penilaian kinerja. Kemudian nanti hasil dari Monas tersebut dituangkan dalam bentuk laporan yang biasanya formatnya seperti laporan hasil kegiatan mulai dari latar belakang, tujuan, pembahasan sampai dengan saran terkait dari apa yang sudah kita tinjau kinerjanya tadi. Biasanya untuk memperoleh data saat

monitoring dan evaluasi tersebut seperti misalnya ketika kita melakukan penelitian yaitu menggunakan metode survei, wawancara atau observasi lalu kita lakukan verifikasi dan reduksi data".

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa kinerja dari Lurah dalam pengelolaan serta pembangunan sarana dan prasarana di Simpang belutu memiliki penilaian khusus dari pihak Kecamatan dan ditinjau ulang apakah terealisasi dari kegiatan tersebut balance atau setimbang dengan anggaran yang dikeluarkan.

### **3.2 Faktor Pendukung Dan Penghambat Peran Lurah Dalam Pengelolaan Dana Kelurahan Untuk Meningkatkan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Kelurahan Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak.**

#### **1. Faktor Pendukung**

Adapun faktor pendukung dari perwujudan pengelolaan dana dari Kelurahan seperti potensi penerimaan Kelurahan yang memberi dukungan memberi dampak signifikan terhadap keberhasilan yang menciptakan pembangunan efektif di masyarakat Kelurahan Simpang belutu baik pelaksanaan lingkungan ataupun ekonomi serta dukungan kebijakan dari pemerintah yang diaplikasikan di Kelurahan kepada realisasi dari APBD tersebut membentuk suatu arah yang baik dan manfaat yang baik pula untuk masyarakat. Ketika menjalankan wewenang terkait pengelolaan anggaran dana Kelurahan di Kelurahan saya belutuk pada faktor pendukung atas dilaksanakannya peraturan pembangunan tersebut yang dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan eksternal.

##### **a. Faktor Internal**

Adapun faktor tersebut adalah SDM dari aparaturnya pemerintahan kelurahan. Hampir separuh dari sudah mampu mengaplikasikan ragam perangkat yang berbasis IT atau teknologi sehingga memudahkan dan mengefisienkan pekerjaan agar lebih cepat. Selain itu juga faktor pendukung lain secara internal dari pengelolaan pembangunan Kelurahan adalah beberapa perangkat Kelurahan ataupun pegawai yang masih dikategorikan berusia muda dan produktif, keadaan birokrasi yang sinergi terhadap pelaporan seperti SPJ baik itu yang dilakukan oleh Lurah, sekretaris Lurah bendahara ataupun staf lain yang mampu memaksimalkan penggunaan IT. Untuk memotivasi peningkatan SDM khususnya pada perangkat Kelurahan Simpang belutu, para pegawai juga sering mengadakan Bimtek atau bimbingan teknis yang sarannya adalah perangkat Kelurahan termasuk Lurah untuk memperoleh bimbingan dan arahan untuk pengelolaan anggaran dana. Kemudian ada faktor internal lain yang mampu mendukung kinerja Lurah ketika mengelola anggaran Dana Kelurahan yaitu dengan mengadakan musyawarah tingkat Kelurahan minimal 4 kali dalam satu tahun. Tujuannya adalah bentuk membahas tentang perencanaan dari pembangunan serta pengelolaan anggaran dana Kelurahan yang sejalan dengan hasil musyawarah sebelumnya yang akan dilanjutkan sesuai dengan visi misi dari lurah yang nantinya akan dipertanggungjawabkan ke Camat.

##### **b. Faktor Eksternal**

Untuk faktor eksternal ini adalah pendorongnya dari kontribusi masyarakat setempat. Adapun bentuk kontribusi dari masyarakat Kelurahan Simpang belutu adalah dengan menyalurkan aspirasi di tahap perencanaan. Ketika musyawarah rencana pembangunan Kelurahan berlangsung, ada keaktifan dari masyarakat yang memaparkan opininya tentang kebutuhan masyarakat di beragam sektor baik itu sektor pendidikan ekonomi, pertanian dan lain-lain Yang pastinya mempengaruhi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Hal ini juga dibuktikan pada hasil wawancara di atas pada salah satu masyarakat serta sekretaris Lurah terkait masukan atas pembangunan rumah singgah atau Taman baca yang gunanya untuk membantu masyarakat baik itu anak-anak maupun orang dewasa yang belum mampu calistung

atau membaca, menulis atau berhitung. Hal tersebut yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan di musyawarah tingkat Kelurahan beserta dengan Camat dan tentunya dipertimbangkan berdasarkan anggaran yang ada.

## **2. Faktor Penghambat**

Di samping dari adanya faktor pendukung pasti ada faktor penghambat ketika melakukan pengelolaan alokasi dana Lurah untuk pembangunan secara nyata atau fisik tadi di Kelurahan Simpang belutu. Adapun faktor penghambat tersebut diantaranya adalah kualifikasi dari SDM dari sisi kompetensi, skill serta inisiatif yang mampu digambarkan oleh kinerja SDM. Kualitas sdm yang masih minim di Kelurahan Simpang Belutu untuk memiliki pengaruh khusus terhadap perencanaan yang akan direalisasikan sehingga dibutuhkan peningkatan kualifikasi SDM di aparatur pemerintahan kelurahan supaya Kelurahan mampu meningkatkan *skill* di bidang masing-masing sejalan dengan rumpun ilmu yang relevan terhadap beragam pekerjaan di kelurahan. Faktor penghambat dari pengelolaan alokasi dana Kelurahan tersebut adalah terkait pencairan dana melalui dana alokasi khusus. Hal ini tentunya akan menghambat pembangunan yang sedang berlangsung seperti infrastruktur yang mungkin ada beberapa prosedur yang memerlukan dana taktis.

### **3.3 Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan Peran Lurah Dalam Pengelolaan Dana Kelurahan Untuk Meningkatkan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Kelurahan Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak**

Upaya dari mengatasi faktor penghambat dari pengelolaan dana Kelurahan oleh lurah Simpang belutu adalah terkait dari kualifikasi SDM yang masih minim. Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi hal tersebut memang diperlukan regenerasi dari SDM yang ada. Untuk menciptakan kualifikasi sumber daya manusia yang berkualitas tentunya dibutuhkan rekrutmen dan seleksi yang objektif yang dilakukan dengan serangkaian tes yang mampu mengukur kompetensi dan keterampilan yang dimilikinya. Selain itu tolak ukur selanjutnya bisa dilihat dari latar belakang pendidikan yang kiranya relevan terhadap pekerjaan yang nantinya akan diemban oleh calon SDM tersebut. Rangkaian tes tersebut bisa dilakukan secara lisan ataupun tulisan yang harapannya mampu melihat seberapa besar soft skill dan hard skill yang dimiliki oleh calon pegawai atau SDM tersebut. Selain itu upaya selanjutnya yang kiranya masih relevan terhadap hal tersebut adalah dengan meminimalisir adanya referensi tenaga kerja. Tidak bisa dipungkiri bahwa fenomena tersebut masih merajalela di Indonesia karena referensi dari calon pegawai atau tenaga kerja lebih dominan terjadi daripada seleksi secara objektif sehingga cenderung terjadi pemilihan calon Pegawai secara subjektif karena berdasarkan referensi yang diterima.

Upaya selanjutnya terkait hambatan kedua yaitu tentang keterlambatan dari pencairan anggaran pemerintah daerah menuju Kelurahan yang mengakibatkan keterlambatan pembangunan. Hal ini sebetulnya tergantung kepada kemampuan dari Lurah yang bersinergi terhadap bendahara untuk mengatur keuangan. Namun, jika kiranya hal tersebut masih kurang optimal dan membutuhkan upaya lain dapat dilakukan dengan pengadaan koperasi. Koperasi merupakan badan usaha yang dikelola oleh para anggota yang di mana anggota tersebut bisa berasal dari pegawai Kelurahan. Kiranya keuntungan dari koperasi tersebut mampu membentuk beberapa urusan pendanaan yang berskala kecil seperti kegiatan pemberdayaan ataupun sosialisasi. Pada sistem koperasi memiliki besaran bunga pinjaman yang beragam yang umumnya dipatok bunga sebesar 7% setiap tahun atau ada yang sebesar 20% setiap tahun. Hal ini tentu menjadi solusi atas persoalan keuangan yang berskala kecil yang dibutuhkan oleh pihak kelurahan ataupun para anggota dari koperasi itu sendiri yang kiranya memerlukan pinjaman.

### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Kebaharuan yang dilaksanakan peneliti terhadap penelitian oleh Aji Budiono terletak pada indikator Norma menunjukkan bahwa transparansi dari pengeluaran dan pengelolaan anggaran Kelurahan dilakukan dan berjalan dengan baik selama musyawarah berlangsung. Selain itu, hal ini juga sejalan dengan landasan legalistik yaitu pada pasal 3 Permendagri 130 tahun 2018 tentang pembangunan ekonomi dan sarana untuk memberi dampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat agar meningkat dari sisi kemudahan bertransportasi dan akses jalan .

Kebaharuan yang dilaksanakan peneliti terhadap penelitian oleh Heru Arnanda terletak pada indikator harapan menunjukkan bahwa Lurah Simpang belutu sudah memiliki perencanaan terlebih dahulu terkait dengan program Pencegahan stunting pada balitadiri dengan musyawarah yang dilandasi dengan regulasi dan dimensi harapan tadi. Adapun regulasi yang menjadi pondasi Lurah dalam merencanakan dan menjalankan program tersebut adalah berdasarkan dengan PP nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan bagian 2 pasal 30 mengenai pendanaan kelurahan tepatnya ayat ke tiga yaitu untuk merealisasikan pemberdayaan masyarakat maka dilaksanakan anggaran Kelurahan oleh lurah selaku pemegang kekuasaan pengguna anggaran.

Kebaharuan yang dilaksanakan peneliti terhadap penelitian Evaluasi menunjukkan Adapun pertanggungjawaban dari Lurah kepada Camat adalah untuk membantu menjalankan tupoksi dan visi misi berupa aktivitas pemerintahan kelurahan seperti pemberdayaan dan pemeliharaan sarana prasarana serta fasilitas publik. Selain itu pada pasal 10 Permendagri 130 Tahun 2018 juga dikatakan bahwa Camat menyusun RKA atau rencana kerja dan anggaran yang nantinya akan dijalankan dan diemban oleh lurah yang berisikan tentang persentase dari alokasi APBD dan alokasi khusus terhadap pembangunan di kelurahan. Setidaknya tidak ada 5% dari anggaran kota yang tidak ada kelurahannya dialokasikan dari APBD sesudah dikurangi dana alokasi khusus.

## **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai peran lurah dalam pengelolaan dana kelurahan untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Simpang Belutu, maka penulis dapat menarik kesimpulan, bahwa :

1. Peran lurah dalam pengelolaan dana kelurahan untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak ditinjau dari pembangunan. Pembangunan sarana dan prasarana dibuktikan peran lurah simpang belutu sudah melaksanakan perencanaan terlebih dahulu terkait dengan program pencegahan stunting pada balita, pembangunan infrastruktur jalan, pembangunan rumah singgah berupa taman baca dengan musyawarah yang dilandasi dengan regulasi. Musyawarah tersebut dilaksanakan dengan melibatkan perangkat kelurahan, lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan, dan masyarakat. Pelaksanakan pembangunan dilaksanakan secara transparansi dari pengeluaran dan pengelolaan anggaran Kelurahan dilakukan sehingga berjalan dengan baik dengan mengajak masyarakat pada pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan. Hal tersebut dibuktikan dengan masyarakat yang antusias dalam mengusulkan pendapat pada musrenbang kelurahan Simpang Belutu, Walaupun masyarakat tidak seluruhnya ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Simpang Belutu.
2. Faktor pendukung kinerja dari Lurah dalam pengelolaan serta pembangunan sarana dan prasarana di Simpang belutu yaitu memiliki penilaian khusus dari pihak Kecamatan dan ditinjau ulang apakah terealisasi dari kegiatan tersebut Balance atau setimpang dengan anggaran yang dikeluarkan. Sehingga lurah wajib melaksanakan tugas dengan transparan

dan penuh tanggung jawab berdasarkan hukum.

3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan peran lurah dalam pengelolaan dana kelurahan yaitu dengan regenerasi SDM melalui rekrutmen dan seleksi yang objektif sehingga dilakukan berdasarkan serangkaian tes yang mampu mengukur kompetensi dan ketrampilan yang dimilikinya. Upaya lainnya juga melakukan optimalisasi partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan dana kelurahan

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini keterbatasan utama yakni waktu. Keterbatasan waktu penulis maksimalkan dalam proses pengumpulan data dari Teknik pengumpulan data yaitu dalam observasi, dokumentasi dan wawancara.

**Arah Masa Depan Penelitian (future work).** Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian yang penulis laksanakan. Peneliti mengharapkan penelitian ini ada saran dan masukan demi kesempurnaan penelitian ini.

#### **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Lurah Kelurahan Simpang Belutu beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian dan memberikan informasi pada penelitian ini.

#### **VI. DAFTAR PUSTAKA**

- Arnanda, H. (2013). *Peran Lurah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kelurahan Maluhu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai kartanegara.*
- Budiono, A. (2014). *Peran Kepemimpinan Lurah Dalam Pembangunan Daerah Melalui Lembaga Pemberdayaan untuk mewujudkan good governance.*
- Fitriyah, N. (2020). Analisis Efektivitas Kinerja Lurah dalam Pelayanan Masyarakat Berdasarkan tugas dan fungsi. *Jurnal Sosial Politik, 1*(1), 122–140.
- Horoepoetri. (2003). Peran politik sebagai implementasi kebijakan di masyarakat. *Jurnal Politik, 2*(1), 36–41.
- Ibrahim, A. (2015). Analisis implementasi politik terhadap kualitas dari kinerja operasional pemerintahan. *Jurnal Politik, 4*(2).
- Kuddy, A. L. (2018). partisipasi Masyarakat, Transparansi Anggaran, dan Peran Pengawasan dalam Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Di Kabupaten Paniai. *Jurnal Manajemen, 2*, 110–124.
- Saputro, M. J. N. P. S. R. H. (2021). Pengelolaan Dana Kelurahan Dengan Perspektif Community Driven Development di Kelurahan Kladufu Kota Sorong. *Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, 9*(2), 64–70.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D.* alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D.* Alfabeta.
- Wardani, K. A. K., Pascarani, N. N. D., & Supriliyani, N. W. (2015). *Peran Kepemimpinan Lurah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus : Kelurahan Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar.*